

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 570 - 422 - 2017
 TANGGAL : 3 April 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 NOMOR 570-54-2017 TENTANG PENDELEGASIAN
 WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 DAN PENANDATANGAN JENIS PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA PTSP :

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
1	PENANAMAN MODAL
	A. Perizinan (8)
	1 Izin Prinsip Penanaman Modal
	2 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
	3 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
	4 Izin Usaha Penanaman Modal (Lokasi dikawasan Industri dan Lokasi diluar kawasan Industri)
	5 Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal (Lokasi dikawasan Industri dan Lokasi diluar kawasan Industri)
	6 Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
	7 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
	8 Izin Pembukaan Kantor Cabang
	B. Non Perizinan
	-
2	PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
	A. Perizinan
	9 Izin Usaha Industri (IUI) melalui Persetujuan Prinsip
	10 Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui Persetujuan Prinsip
	11 Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan melalui Persetujuan Prinsip
	12 Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan tanpa melalui Persetujuan Prinsip
	B. Non Perizinan
	13 SIUP Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)
	14 Angka Pengenal Importir Umum / Produsen (API-U/P)
3	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	A. Perizinan
	15 Izin Pengeboran Air Tanah (SIP)
	16 Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA)
	17 Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
	18 Izin Penggalian
	19 Surat Izin Juru Bor

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	20 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan
	21 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara
	22 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral bukan Logam dan Batuan
	23 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara
	24 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral bukan Logam dan Batuan
	25 Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara
	26 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) / Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	27 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral bukan Logam dan Batuan
	28 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan
	29 Izin Sementara untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan
	30 Izin Usaha Pertambangan Khusus Sekali Pengangkutan Penjualan
	31 Izin Prinsip IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian komoditas tambangnya berasal dari dalam provinsi
	32 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian komoditas tambangnya berasal dari dalam provinsi
	33 Izin Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
	34 Izin Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
	35 Izin Diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral bukan Logam dan Batuan
	36 Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
	37 Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
	38 Izin Operasi (IO) Diatas 200 Kva
	39 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 25 kVA s/d 200 kVA
	40 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS)
	41 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
	42 Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
	B. Non Perizinan
	-
4	KESEHATAN
	A. Perizinan
	43 Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
	44 Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Penanggung Jawab Teknis)
	45 Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Penggantian Pimpinan)
	46 Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Perubahan Alamat / Gudang)

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
47	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Penutupan)
48	Izin cabang Penyalur Alat Kesehatan (Hilang)
49	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)
50	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pergantian Penanggung Jawab)
51	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pergantian Kepala Cabang)
52	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Penutupan)
53	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Karena Hilang)
54	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pembaharuan)
55	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pembaharuan dan Pergantian Penanggung Jawab)
56	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pembaharuan dan Pergantian Kepala Cabang)
57	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Kepala Cabang)
58	Izin Mendirikan RS. Khusus Tipe A dan B
59	Izin Mendirikan RS. Umum Tipe A dan B
60	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT)
61	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Penutupan)
62	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT Penggantian Direktur)
63	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT Pergantian Penanggung Jawab Teknis)
64	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT Pembaharuan)
65	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT Pembaharuan dan Pergantian Penanggung Jawab)
66	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
67	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Direktur)
B.	Non Perizinan
68	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
69	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(Pengantian Penanggung Jawab Teknis)
70	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Penggantian Pimpinan)
71	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Penabahan/perluasan Lokasi)
72	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Penutupan)

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
73	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Karena hilang)
74	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
75	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Penggantian Penanggung Jawab Teknis)
76	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Penggantian Pimpinan)
77	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Perubahan Alamat/Gudang)
78	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Penutupan)
79	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Hilang)
80	Rekomendasi Perizinan Laboratorium Utama
81	Rekomendasi Izin Operasional RS. Khusus Tipe A dan B
82	Rekomendasi Izin Operasional RS. Umum Tipe A dan B
83	Rekomendasi Perizinan Laboratorium Madya
84	Rekomendasi Administrasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)
85	Rekomendasi Administrasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF Pergantian Penanggung Jawab)
86	Rekomendasi Administrasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF Pergantian Kepala Cabang)
87	Rekomendasi Izin Produksi Kosmetik
88	Rekomendasi Administrasi izin Produksi Kosmetik (Pergantian Penanggung Jawab)
89	Rekomendasi Administrasi Izin Produksi Kosmetik (Pergantian Direktur)
90	Rekomendasi Administrasi Izin Produksi Kosmetik (Pembaharuan)
91	Rekomendasi Administrasi Izin Produksi Kosmetik (Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
92	Rekomendasi Administrasi Izin Produksi Kosmetik (Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Direktur)
93	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT)
94	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pergantian Penanggung Jawab Teknis)
95	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pergantian Direktur)
96	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pembaharuan)
97	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
98	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Direktur)
99	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Penutupan)
100	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	101 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pergantian Penanggung Jawab)
	102 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pergantian Direktur)
	103 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pembaharuan)
	104 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pembaharuan dan Pergantian Penanggung Jawab)
	105 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
	106 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Direktur)
	107 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Karena Hilang)
	108 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Penutupan)
	109 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi Baru (Pembaharuan)
	110 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi Baru (Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
	111 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Penutupan)
	112 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi Baru (Pembaharuan dan Penambahan Perluasan Lokasi)
	113 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi Baru (Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Penambahan/Perluasan Lokasi)
5	PENDIDIKAN
	A. Perizinan
	114 Izin Pendirian Pendidikan Khusus (Sekolah Luar Biasa / SLB)
	115 Izin Pendirian Pendidikan Khusus (SMA)
	116 Izin Pendirian Pendidikan Khusus (SMK)
	B. Non Perizinan
6	KEHUTANAN
	A. Perizinan
	117 Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN)
	118 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKTR)
	119 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
	120 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dibawah 5 (lima) Ha untuk Kepentingan Non Komersial
	121 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK)
	122 Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
	123 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
	B. Non Perizinan

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	124 Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	125 Pertimbangan Gubernur Dalam Rangka Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	126 Pertimbangan Gubernur Dalam Rangka Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	127 Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
	128 Rekomendasi Perpanjangan (IUPHHK-HA/HT/RE) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	129 Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
7	KELAUTAN & PERIKANAN
	A. Perizinan
	130 Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP)
	131 Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (SIUP)
	132 Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan (SIUP)
	133 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
	134 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
	135 Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)
	B. Non Perizinan
	-
8	TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	A. Perizinan
	136 Izin Usaha Produksi Benih
	137 Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
	138 Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
	139 Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya dan Pengolahan (IUP)
	140 Perubahan Luas Lahan
	141 Perubahan Jenis Tanaman Usaha Perkebunan
	142 Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
	143 Persetujuan Diversifikasi Usaha Perkebunan
	B. Non Perizinan
	-
9	TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
	A. Perizinan

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	144 Izin Kantor Cabang PPTKIS (Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta)
	145 Izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta)
	146 Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
	B. Non Perizinan
	147 Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
	148 Pengesahan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
	149 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pemangangan di Luar Wilayah Indonesia
10	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	A. Perizinan
	150 Izin Penggunaan Sumber Daya Air
	151 Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
	152 Izin Pemanfaatan Sungai Untuk Pengambilan Galian C
	153 Izin Pemanfaatan Air Untuk Kebutuhan PLTMH
	154 Izin Pemanfaatan Sarana dan Prasarana ke PU an
	B. Non Perizinan
11	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	A. Perizinan
	155 Izin Penempatan Utilitas dan Bangunan
	156 Izin Penempatan Iklan dan Media Informasi
	157 Izin Penempatan Bangun-Bangunan
	158 Izin Penempatan Bangun Gedung di Rumija
	B. Non Perizinan
	159 Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan khusus
	160 Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan
12	PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
	A. Perizinan
	B. Non Perizinan
	161 Izin Lokasi antar Daerah
13	PARIWISATA
	A. Perizinan

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
162	Usaha Perjalanan Wisata/Wisata Religi
	<i>Usaha Akomodasi :</i>
163	Usaha Hotel
164	Usaha Pondok Wisata
	<i>Usaha Kawasan Wisata:</i>
165	Usaha Golf
166	Usaha Taman Rekreasi
	<i>Usaha Jasa Transportasi Wisata:</i>
167	Usaha Angkutan Jalan Wisata
168	Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata
	<i>Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Rekreasi dan Hiburan Umum:</i>
169	Usaha Bar / Rumah Makan
170	Usaha Club Malam
171	Usaha Diskotik
172	Usaha Kafe
173	Usaha Bioskop
174	Usaha Pub
175	Usaha Karaoke
176	Usaha Bilyard
177	Usaha Jasa Impresariat/Promotor
	<i>Usaha Wisata Tirta</i>
178	Usaha Kolam Renang
179	Usaha Wisata Selam (Diving)
180	Usaha Wisata Surfing
	<i>Usaha Spa</i>
181	Usaha Refleksi
182	Usaha Sauna
183	Usaha Salon
	<i>Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Inserntif, Konferensi dan Pameran:</i>
184	Arum Jeram
185	Paralayang
186	Panjat Tebing/Panjat Dinding
187	Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
188	Usaha Jasa Informasi Pariwisata
189	Usaha jasa Pramuwisata
190	Usaha Jasa Makanan dan Minuman
191	Usaha Restoran
192	Usaha Rumah Makan
193	Usaha Jasa Boga

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	B. Non Perizinan
	-
14	PERHUBUNGAN
	A. Perizinan
	194 Izin Dalam Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Pemadu Moda
	195 Izin Tidak Dalam Trayek Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dan Taksi
	196 Izin Insidental Antar Kota Antar Provinsi (Perusahaan Angkutan Umum Domisili Sumatera Barat)
	197 Izin Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek Kartu Pengawasan (KP) AKAP, Pemadu Moda, AJDP dan Taksi
	198 Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi
	199 Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
	200 Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
	201 Izin Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan
	202 Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut
	203 Izin Usaha Tally Mandiri
	204 Izin Usaha Pengusahaan Depo Peti Kemas
	205 Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
	206 Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
	207 Izin Pengembangan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
	208 Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
	209 Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
	210 Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
	211 Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional
	212 Izin Pembangunan dan Pengadaan kapal berukuran kecil GT.7 (GT<7) yang berlayar di laut
	213 Izin Tidak Dalam Trayek Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), Angkutan Pariwisata dan Angkutan Sewa
	B. Non Perizinan
	214 Rekomendasi STNK Angkutan Penumpang Umum
	215 Rekomendasi STNK Angkutan Penumpang Umum menjadi Kendaraan Pribadi
	216 Izin Dalam Trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	217 Surat Pengantar Penerbitan Izin / Kartu Pengawasan (KP) AKAP, AJAP, Pariwisata dan angkutan sewa
	218 Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul
	219 Rekomendasi Penetapan Rencana Induk dan DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpulan Regional
	220 Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum
	221 Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus
	222 Rekomendasi Penetapan Lokasi DLKr dan DLKp Pelabuhan Utama
	223 Rekomendasi Penetapan Lokasi DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpul
	224 Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri
	225 Rekomendasi pertimbangan Teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Pengumpulan Regional
	226 Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Bagi Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/kota dalam daerah Provinsi dan Pelabuhan Internasional
15	LINGKUNGAN HIDUP
	A. Perizinan
	227 AMDAL (Keputusan Kelayakan Lingkungan / SKKL dan Izin Lingkungan)
	228 Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan
	229 Izin Penimbunan Limbah B3 Medis Skala Provinsi
	230 Izin Pengangkutan Limbah B3 Medis Skala Provinsi dengan Kendaraan Roda 3 (tiga) Skala Provinsi
	231 Izin Pengangkutan Limbah B3 Skala Provinsi
	232 Izin Pengumpul Limbah B3 Skala Provinsi
	B. Non Perizinan
	233 Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi
16	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	A. Perizinan
	234 Izin Pendirian Distributor Obat Hewan
	B. Non Perizinan
	235 Rekomendasi Pemasukan Obat Hewan oleh Distributor
	236 Rekomendasi Pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) seperti Daging Sapi atau ayam beku, Susu. Telur dsb
	237 Rekomendasi Pengeluaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) seperti Daging Sapi atau ayam beku, Susu. Telur dsb
	238 Surat Nomor Kontrol Venteriner

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	239 Rekomendasi Pemasukan Hewan Ternak/DOC/DOD
	240 Rekomendasi Pengeluaran Hewan Ternak/DOC/DOD
	241 Surat Keterangan Layak Bibit
17	SOSIAL
	A. Perizinan
	242 Izin Pengasuhan Anak
	243 Izin Pengangkatan Anak
	244 Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial
	B. Non Perizinan
	245 Undian Gratis Berhadiah (UGB)
18	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	A. Perizinan
	246 Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
	B. Non Perizinan
	247 Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Koperasi

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO